

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 31

TAHUN 2006

SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 31 TAHUN 2006

TENTANG

**SKALA GAJI POKOK DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN PEGAWAI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR)
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Skala Gaji Pokok dan Tunjangan-tunjangan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten.....2

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang.....3

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 25 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka 2004 Nomor 5, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2004, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SKALA GAJI POKOK DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR) DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).
6. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).
7. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).
8. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan isteri/suami dan anak.
9. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

Pasal 2

Skala Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Majalengka sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Daftar Skala Gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3.....6

Pasal 3

Tunjangan Istri/ Suami sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Gaji Pokok hanya untuk 1 (satu) orang istri/ suami.

Pasal 4

Tunjangan Anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari Gaji Pokok untuk setiap anak dan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 5

Tunjangan Pangan sebesar 10 Kg (sepuluh kilogram) beras paling banyak untuk 4 (empat) orang yang besaran harganya disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 6

Tunjangan Kemahalan, dan Tunjangan Kesehatan bagi karyawan yang telah mempunyai masa kerja keseluruhan di atas 2 (dua) tahun besarnya tunjangan disesuaikan dengan kemampuan PD BPR yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 7

Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Perumahan hanya diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan struktural besarnya tunjangan disesuaikan dengan kemampuan PD BPR yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 8

Disamping tunjangan-tunjangan tersebut, Direktur dapat menetapkan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan PD BPR setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 9.....7

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Desember 2006

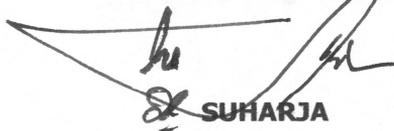
BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 26 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR 31 SERI 5**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 31 TAHUN 2006

Tanggal : 26 Desember 2006

Tentang : SKALA GAJI POKOK DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN

PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD. BPR) DI KABUPATEN MAJALENGKA

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI PD BPR KABUPATEN MAJALENGKA

MKG	GOLONGAN A				MKG	GOLONGAN B				MKG	GOLONGAN C				MKG	GOLONGAN D				
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4	5
0	495,975																			
1																				
2	507,075																			
3		534,450	557,100	580,650																
4	518,475																			
5		546,525	569,625	593,700																
6	530,175				0	625,800														
7		558,750	582,450	607,050	1	632,850														
8	542,025				2															
9		571,350	595,500	620,700	3	647,025	674,400	702,975	732,675											
10	554,250				4															
11		584,175	608,925	634,650	5	661,575	689,625	718,800	749,175	0	780,900	813,900	848,325	884,250	0	921,675	960,675	1,001,325	1,043,700	1,087,800
12	566,250				6					1					1					
13		597,300	622,575	648,900	7	676,500	705,075	734,925	766,050	2	798,450	832,200	867,450	904,125	2	942,375	982,275	1,023,825	1,067,100	1,112,250
14	579,450				8					3					3					
15		610,725	636,600	663,525	9	691,650	720,975	751,425	783,225	4	816,375	850,950	886,950	924,450	4	963,600	1,004,325	1,046,850	1,091,100	1,137,300
16	592,500				10					5					5					
17		624,450	650,925	678,450	11	707,250	737,175	768,375	800,850	6	834,750	870,075	906,900	945,225	6	985,200	1,026,900	1,070,325	1,115,625	1,162,875
18	605,775				12					7					7					
19		638,550	665,550	693,000	13	723,150	753,750	785,625	818,850	8	853,500	889,575	924,975	966,450	8	1,006,650	1,050,000	1,094,400	1,140,750	1,187,475
20	619,425				14					9					9					
21		652,875	680,475	709,275	15	739,350	770,700	803,250	837,225	10	872,700	909,600	948,075	988,200	10	1,030,050	1,073,625	1,119,000	1,166,400	1,215,750
22	633,300				16					11					11					
23		667,575	695,775	725,250	17	756,000	788,025	821,325	856,050	12	892,275	930,075	969,375	1,010,400	12	1,053,150	1,097,700	1,144,200	1,192,575	1,243,050
24	647,550				18					13					13					
25		682,575	711,450	741,525	19	773,025	805,725	839,775	875,325	14	912,375	951,000	991,200	1,033,125	14	1,076,850	1,122,300	1,169,925	1,219,425	1,271,025
26	662,100				20					15					15					
27		697,875	727,425	758,175	21	790,350	823,800	858,675	894,975	16	932,850	972,375	1,013,475	1,056,375	16	1,101,075	1,147,650	1,196,175	1,246,800	1,292,100
					22					17					17					
					23	808,125	842,325	877,950	915,150	18	953,850	994,200	1,036,275	1,080,075	18	1,125,825	1,173,450	1,223,100	1,252,350	1,328,775
					24					19					19					
					25	826,350	861,300	897,750	935,700	20	975,300	1,016,550	1,059,525	1,104,375	20	1,151,100	1,199,850	1,250,550	1,303,500	1,358,625
					26					21					21					
					27	844,875	880,650	917,925	956,700	22	997,200	1,039,425	1,083,375	1,129,200	22	1,176,975	1,226,775	1,278,675	1,332,825	1,389,225
					28					23					23					
					29	863,250	900,450	938,550	978,225	24	1,019,625	1,062,750	1,107,750	1,154,625	24	1,203,450	1,254,375	1,307,475	1,362,750	1,420,425
					30					25					25					
					31	883,275	920,700	959,625	1,000,200	26	1,042,575	1,086,675	1,132,650	1,180,575	26	1,230,525	1,282,575	1,336,800	1,393,425	1,452,375
					32					27					27					
					33	903,150	941,400	981,225	1,022,700	28	1,065,975	1,111,125	1,158,075	1,207,125	28	1,258,200	1,311,375	1,366,875	1,424,700	1,485,000
										29					29					
										30	1,089,975	1,136,100	1,184,100	1,234,200	30	1,286,475	1,340,850	1,397,625	1,456,725	1,518,375
										31					31					
										32	1,114,425	1,161,600	1,210,725	1,262,100	32	1,315,350	1,371,000	1,429,050	1,489,500	1,552,500

SEKRETARIS DAERAH,

SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR